



PROFIL GENDER KOTA DUMAI 2021



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Tim Penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku "Profil Gender Kota Dumai Tahun 2021".

Dalam perspektif gender, penyediaan data, analisis dan pelaporan terpilah menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi gender di Kota Dumai Tahun 2020. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin menjadi inti dalam menghasilkan Statistik Gender (dalam laporan ini disebut data gender) yaitu informasi yang mengandung isu gender, sebagai hasil dari analisis gender. Data gender menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) diberbagai bidang pembangunan agar responsif gender.

Penyusunan profil terpilah Gender dimaksudkan sebagai bahan awal bagi OPD – OPD terkait dalam melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di lingkungan Kota Dumai, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Terimakasih kepada seluruh pihak terkait terutama kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintahan Kota Dumai dan Instansi terkait yang telah memfalisilitasi ketersediaan data dan informasi Gender yang telah diberikan.

Kami menyadari bahwa profil gender ini masih jauh dari sempurna dan dengan segala keterbatasan yang ada, maka kerjasama yang sinergis dan berkesinambungan sangat diperlukan demi sempurnanya penyusunan profil gender ini dan semoga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kota Dumai.

Dumai, Juni 2021
Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Dumai



DAMERIA, SKM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640605 198603 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Sasaran	5
1.5 Sumber Data	5
1.6 Sistematika	5
BAB II KONSEP DAN METODE SISTEM DATA GENDER	6
2.1 Konsep dan Metode Pengumpulan Data	6
2.2 Waktu Penyusunan	6
2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	6
BAB III PENYAJIAN DATA GENDER	8
3.1 Data Gender Bidang Demografi (Kependudukan).....	8
3.2 Data Gender Bidang Pendidikan.....	11
3.2.1 APM dan APK.....	11
3.2.2 Angka Melek Huruf Latin dan Lainnya	12
3.2.3 APS Berdasarkan Umur dan Jenis kelamin	13
3.3 Data Gender Bidang kesehatan dan KB	14
3.3.1 Angka Kematian Ibu	15
3.3.2 Layanan Kesehatan Untuk Ibu Hamil.....	16
3.3.3 Kepesertaan keluarga Berencana	17
3.3.4 Penderita HIV dan AIDS	18
3.4 Data Gender Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan.....	20
3.5 Data Gender Bidang Pemerintahan	23
3.5.1 Data Aparatur Sipil Negara	23
3.6 Data Gender Bidang Sosial Kemasyarakatan.....	27
3.7 Data Organisasi dan Kelembagaan.....	29
3.7.1 Bidang Politik.....	29
3.7.2 Data Organisasi Perempuan.....	30
3.7.3 Data Kelompok Tani.....	31
3.8 Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	31
3.8.1 Kekerasan Terhadap Perempuan.....	32
3.7.2 Kekerasan Terhadap Anak.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan Tahun 2020	13
Tabel 3.2	Jumlah Kasus dan Kematian Akibat AIDS Menurut Jenis dan Kelompok Umur Kota Dumai Tahun 2020	20
Tabel 3.3	Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.....	21
Tabel 3.4	Data Pertumbuhan UMKM Berdasarkan Sektor di Kota Dumai Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM	22
Tabel 3.5	Jumlah Pengelola usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai.....	22
Tabel 3.6	Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Pendidikan dan Unit Kerja di Kota Dumai	23
Tabel 3.7	Jumlah Personil Polisi Se- Kota Dumai Tahun 2020.....	24
Tabel 3.8	Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Menurut jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2020	25
Tabel 3.9	Jumlah Panti Sosial Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2020	28
Tabel 4.0	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Dumai Tahun 2020.....	28
Tabel 4.1	Jumlah Anggota Legislatif di Kota Dumai	29
Tabel 4.2	Jumlah Organisasi Perempuan Kota Dumai Tahun 2019-2020.....	30
Tabel 4.3	Jumlah Kelompok Tani Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin 2019-2020	31
Tabel 4.4	Jumlah Kasus Perempuan di Kota Dumai Tahun 2020.....	32
Tabel 4.5	Jumlah Kasus Anak di Kota Dumai Tahun 2020	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Batas Wilayah kota Dumai	9
Gambar 2	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Dumai.....	9
Gambar 3	Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2020	10
Gambar 4	APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2020.....	12
Gambar 5	AMH Kelompok Umur 15 Tahun Keatas Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2020	12
Gambar 6	Jumlah Guru Negeri/ Swasta di Sekolah Dasar (SD).....	13
Gambar 7	Jumlah Guru Negeri/ Swasta di Sekolah SMP	13
Gambar 8	Jumlah Kematian Ibu menurut Kelompok Umur Kota Dumai Tahun 2020.....	15
Gambar 9	Jumlah penyebab Kematian Ibu Kota Dumai Tahun 2020	16
Gambar 10	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD).....	16
Gambar 11	Jumlah dan Persentase Cakupan Ibu Hamil yang Berkunjung ke Fasilitas Kesehatan K1	17
Gambar 12	Jumlah dan Persentase Cakupan Ibu Hamil yang Berkunjung ke Fasilitas Kesehatan K4	17
Gambar 13	Jumlah Cakupan dan Proporsi KB Pasca Persalinan menurut Jenis Kontrasepsi Kota Dumai Tahun 2020.....	18
Gambar 14	Jumlah Penderita HIV menurut Jenis dan Kelompok Umur Kota Dumai Tahun 2020.....	18
Gambar 15	Jumlah Fakir Miskin di Kota Dumai Tahun 2020	21
Gambar 16	Jumlah Pegawai Kejaksaan Negeri menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai tahun 2020.....	25
Gambar 17	Jumlah Pegawai Imigrasi menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai tahun 2020.....	26
Gambar 18	Jumlah Pegawai Pengadilan Agama menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2020	26
Gambar 19	Jumlah Pegawai Kementerian Agama menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2020	27
Gambar 20	Jumlah Fakir Miskin Kota Dumai Tahun 2020.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Gender merupakan karakteristik sosial yang membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, status relasi yang didapat dengan cara belajar yang memiliki sifat beragam dan dinamis sesuai budaya dan status sosial. Terbentuknya stigma perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan oleh karena disosialisasikan dan dikonstruksikan secara sosial atau kultural melalui proses perkembangan pola berfikir masyarakat. Kesenjangan gender di Indonesia relatif masih sangat tinggi. Secara nyata tampak dari kondisi ketimpangan gender masih terjadi pada berbagai aspek bidang pembangunan seperti di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan bidang politik. Tingkat pendidikan perempuan masih tertinggal jauh dengan jenjang pendidikan yang di capai laki-laki. Ketertinggalan perempuan dalam bidang ekonomi terlihat dari kemiskinan yang dialami oleh perempuan yang ditunjukkan dengan rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan. Maraknya kasus tindak kekerasan serta rendahnya indeks pembangunan dan pemberdayaan gender adalah indikator ketertinggalan perempuan dibidang sosial dan budaya. Sedangkan masih terbatasnya perempuan yang menjadi anggota legislatif merupakan indikasi masih rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik. Kondisi ini menggambarkan bahwa permasalahan gender masih menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan serius.

Dalam rangka meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender kedalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender kedalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. Isu strategis pengarusutamaan gender dituangkan dalam visi pembangunan nasional melalui penghapusan diskriminasi gender. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender juga menginstruksikan kepada semua pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,

pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang berspektif gender sesuai bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mencantumkan sasaran pembangunan berperspektif gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan; peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan; pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan; dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), baik di level pusat maupun daerah. Evaluasi hasil pembangunan perspektif gender menggunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau GAP pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Pembangunan manusia diukur melalui beberapa indikator yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan. Sedangkan IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mengupayakan kesetaraan gender.

Namun masih terdapat banyak permasalahan yang perlu ditemukan solusi terkait dengan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol berbagai program pembangunan, terutama pendidikan perempuan, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Perhatian terhadap isu gender ini sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan keamanan dan kestabilan (*security*) menuju pendekatan kesejahteraan dan keadilan (*prosperity*) atau dari pendekatan produksi ke pendekatan kemanusiaan dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka. Terjadinya perubahan paradigma pembangunan seperti ini, menjadi dasar untuk mengatasi persoalan gender. Pengarusutamaan Gender mengamanatkan tujuh prasyarat yaitu 1) komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam renstra; 2) kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. (kebijakan, strategi, program, panduan, Juklak/juknis); Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, focal point, forum, dan tim; 4) sumber daya yang

memadai yaitu sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender dan sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG (Pengarustamaan Gender) dan ARG (Anggaran Responsif Gender); 5) sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin; 6) alat analisis, untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi 7) dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG. Ketujuh prasyarat ini saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri.

Komitmen untuk melaksanakan PUG menjadi prasyarat utama dari PUG. Untuk dapat merespon kesenjangan gender, perlu dilakukan analisis gender yang didukung dengan data terpilah dan data spesifik gender yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu melakukan penyusunan data statistik berbasis gender. Karenanya, Pemerintah Kota Dumai perlu menyusun profil gender berdasarkan jenis kelamin dalam berbagai aspek pembangunan yang berbasis teknologi informasi yang dapat memberikan petunjuk secara lebih jelas kepada para penentu kebijakan dan penyusun program kegiatan sehingga penanganan isu gender dapat dilakukan secara cermat dan tepat.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
2. Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
3. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia (Tambahan Lembaran Negara 3796);
4. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan;mengamanatkan kepada seluruh kementerian/lembaga dan daerah untuk melaksanakan pengarustamaan gender guna terselenggaranya perencanaan,penyusunan,pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional;
5. UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang – undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak –hak Anak).
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender didaerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik;

1.3 TUJUAN

Ada beberapa tujuan dalam penyusunan Profil Gender Kota Dumai Tahun 2021 ini:

1. Memperkuat kelembagaan (peraturan , lembaga, mekanisme) sistem data dengan memilah menurut jenis kelamin dan umur di kementerian/ lembaga dan daerah, yang terpercaya, dapat disajikan cepat, akurat, komprehensif, dan mutakhir.
2. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang responsif gender dan peduli anak lembaga dan daerah.
3. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di Kota Dumai secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan.

4. Tersedianya profil gender dalam bentuk data terpilah yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan gender di bidang. kesehatan, pendidikan, Ekonomi dan ketenagakerjaan, Politik, Pertanian, Agama, data kelembagaan organisasidan hukum dan sosial budaya, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Dumai.

1.4 SASARAN

Sasaran dalam penyusunan Profil Gender Kota Dumai Tahun 2021 yang menyangkut segala aspek baik aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, kependudukan, ketenagakerjaan, politik, hukum, pertanian, sosial budaya, lingkungan, agama dan data kelembagaan Organisasi Perempuan dan Anak di Kota Dumai.

1.5 SUMBER DATA

Data-data yang disajikan dalam Profil Gender Kota Dumai Tahun 2020 ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS Kota Dumai), Dinas Kesehatan Kota Dumai, Dinas Pendidikan, Dinas kependudukan dan Sipil Kota Dumai , Satuan polisi Pamong Praja Kota Dumai , POLRES (Kepolisian Resor) Kota Dumai, Dinas Sosial, Kejaksaan Kota Dumai, Pengadilan Agama Kota Dumai, Pengadilan Negeri Kota Dumai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dan Lintas Sektor, lainnya.

1.6 SISTEMATIKA

Laporan ini dibuat Untuk Profil Gender Tahun 2021. Adapun sistematikanya dimulai dengan menguraikan latar belakang dan ruang lingkup, bagian berikutnya adalah pokok-pokok Profil Gender selanjutnya adalah implementasinya berupa pengumpulan dan penyajian data terpilah, serta pemanfaatan data terpilah.

BAB II

KONSEP DAN METODE SISTEM DATA GENDER

2.1 KONSEP DAN METODE PENGUMPULAN DATA

Prinsipnya konsep dan metode yang dipakai harus menghindari bias gender. Bias gender disini diartikan sebagai pendapat, pandangan, perlakuan terhadap sesuatu atas dasar prasangka yang belum tentu benar. Konsep bahwa kepala keluarga itu laki-laki adalah konsep yang bias gender. Memandang kepala keluarga sebagai responden atas nama keluarganya itu juga dianggap metode yang bias gender. Karena sebagai perempuan dan sebagai laki-laki bisa berbeda dalam kebutuhan memandang keadaan sesuatu, dalam kebutuhan, kesempatan, tantangan. Ini berarti konsep dan definisi serta metode pengumpulan data yang digunakan harus dikembangkan agar dapat "menangkap" perbedaan-perbedaan itu.

Metode pengumpulan data profil gender dapat dilakukan melalui berbagai cara pengumpulan data. Namun dalam keseluruhan proses pengumpulan data harus selalu dengan lensa gender, misalnya dalam perumusan masalah ada mengandung isu gender, rencana penelitian (informan dan sampel terdiri dari laki-laki dan perempuan), data dipilah menurut jenis kelamin dan umur dan harus selalu memandangnya dari perspektif gender, artinya sejak semula pemilahan data menurut jenis kelamin dan umur adalah keharusan.

2.2 WAKTU PENYUSUNAN

Penyusunan Profil Gender Kota Dumai Tahun 2021 ini dilakukan dalam kurun waktu Februari – Juli 2021.

2.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian berperspektif gender ini antara lain menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan.

- Pencatatan dan pelaporan. Profil gender berdasarkan data terpilah menurut jenis kelamin dapat dikumpulkan melalui formulir yang sudah ada yang dikumpulkan/dilaksanakan/dicatat secara rutin oleh kementerian/lembaga

dan daerah, misalnya administrasi kepegawaian. Jika tidak ada data terpilah menurut jenis kelamin, bisa ditambahkan satu kolom untuk jenis kelamin pada formulir yang sudah ada. Dalam Pelaporan data dan informasi yang dipisahkan dengan jelas untuk masing-masing jenis kelamin, dianalisa dengan menambah variabel-variabel/sub-sub variabel misalnya (1) tingkat pendidikan, (2) disiplin ilmu, (3) tingkat eselon, (4) lama kerja, dst. Jika ada kesenjangan gender, disebutkan juga apa yang menjadi faktor-faktor penyebab kesenjangan bisa juga ditambahkan bagaimana mengatasinya.

BAB III

PENYAJIAN DATA GENDER

3.1 DATA GENDER BIDANG DEMOGRAFI (KEPENDUDUKAN)

Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.

Penduduk memiliki dinamika kependudukan yang dapat memiliki pengaruh terhadap pembangunan suatu daerah. Dinamika pembangunan berlangsung diberbagai bidang baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, peran dan fungsi penduduk sangat strategis oleh karenanya pembangunan bidang kependudukan selalu mendapat tempat utama. Pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahannya mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya. Pada bab ini akan dipaparkan kondisi kependudukan di Kota Dumai dari beberapa aspek yang dapat menunjukkan kondisi perkembangan penduduk menurut jenis kelamin laki-laki perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.

Kota Dumai terletak di pesisir pantai pulau Sumatera sebelah timur. Wilayah Dumai berada pada posisi antara 1010.23".37-1010.8".13 bujur timur dan 10.23".23' – 10.24".23' lintang utara. Berdasar posisi ini, zona waktu Dumai adalah UTC+7. Dumai memiliki luas wilayah 1.727.385 km². Batas – batas wilayah Kota Dumai bersebelahan dengan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, kabupaten Bengkalis.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.



Gambar 1. Peta batas wilayah Kota Dumai

1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



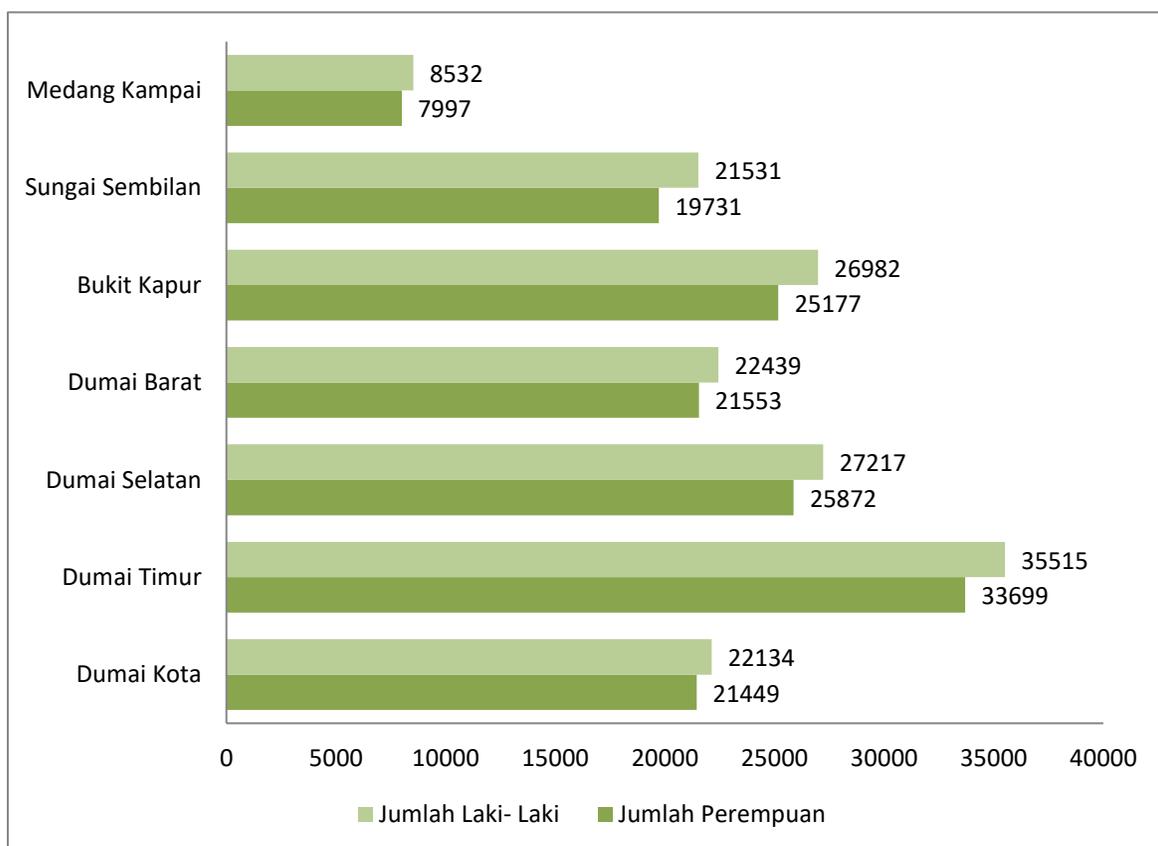
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2020

Jumlah penduduk Kota Dumai seluruhnya berjumlah 319,827 jiwa, dengan komposisi laki-laki sebanyak 164,350 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 155.477 jiwa (lihat Gambar 1). Komposisi jumlah penduduk terdapat

kesenjangan kinerja, yaitu kinerja perempuan lebih rendah dibandingkan dengan kinerja laki-laki..

Mengetahui komposisi jenis kelamin penduduk di suatu daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan stakeholder yang ada dalam menyusun rencana pembangunan. Pada dasarnya, pembangunan suatu negara jelas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan atau peningkatan kualitas hidup masyarakatnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, meskipun dalam setiap proses pembangunan mempunyai beragam pendekatan. Namun demikian, capaian pembangunan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat tidak terkecuali -laki-laki dan perempuan, pada kenyataannya seringkali belum bisa dinikmati secara merata, dalam artian pembangunan belum memberi manfaat secara adil kepada perempuan dan laki-laki. Pembangunan yang semula diasumsikan akan bermanfaat secara keseluruhan – netral- baik kepada laki-laki maupun perempuan, pada kenyataannya memberi kontribusi bagi timbulnya ketidakadilan dan kesenjangan gender (Subiyantoro 2005:1).

Gambar 3. Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2020



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2020

Terdapat 7 kecamatan di Kota Dumai, dengan persebaran penduduk paling tinggi adalah di Kecamatan Dumai Timur, dengan jumlah penduduk 69.214 jiwa diikuti oleh Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 53.089 jiwa dan Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 52.159 jiwa. Jika dilihat lebih cermat, Gambar 3 menunjukkan pada kita bahwa pada seluruh kecamatan penduduk dengan jenis kelamin laki-laki mendominasi.

3.2 DATA GENDER BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Pendidikan juga merupakan sarana sosial untuk mencapai tujuan sosial, yang dapat berguna untuk menjamin kelangsungan hidup seseorang. Pendidikan juga menjadi salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Suatu masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan juga memiliki kualitas hidup yang tinggi sehingga kesejahteraan dapat tercapai (Aini etl al. 2018).

Pendidikan juga merupakan hal terpenting untuk membentuk kepribadian. Pendidikan itu tidak selalu berasal dari pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi. Pendidikan informal dan non formal pun memiliki peran yang sama untuk membentuk kepribadian, terutama anak atau peserta didik dan masyarakat pada umumnya (Ilma 2015).

3.2.1 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan disuatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam

pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Gambar 4 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2020



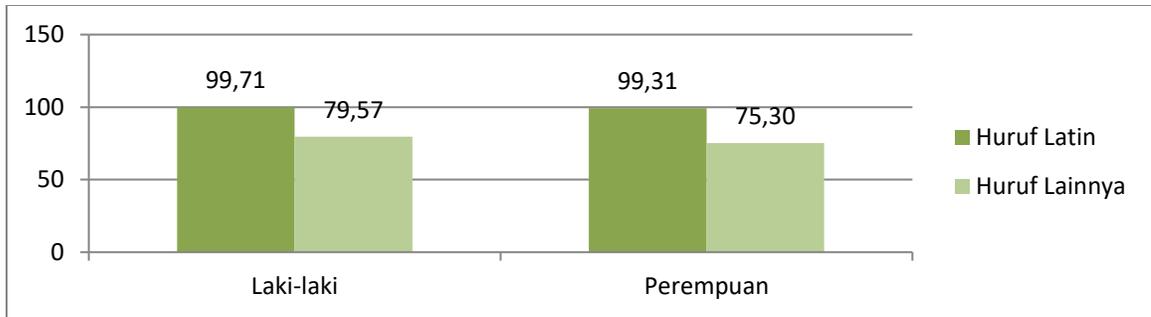
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai

Berdasarkan Gambar diatas Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan di Kota Dumai Tahun 2020 paling tinggi di jenjang pendidikan SD/MI tahun adalah, 99 , SMP/MTs adalah 88,86 dan SMA/SMK/MA adalah 71,14. Sedangkan untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kota Dumai Tahun 2020 paling tinggi di jenjang pendidikan SD/MI adalah 108,86 , SMA/SMK/Ma adalah 88,86 dan SMP/MTs adalah 103.3

3.2.2 Angka Melek Huruf Latin dan Lainnya

Angka melek huruf/kemampuan membaca dan menulis ini bersama-sama faktor lainnya, secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi jumlah penduduk miskin di suatu daerah (Jolianis et al. 2013; Anggadini 2015) dan mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka (Hajji dan Nugroho 2013) daerah tersebut.

Gambar 5 Angka Melek Huruf (AMH) Kelompok Umur 15 Keatas Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kota Dumai Tahun 2020



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai

Berdasarkan Gambar diatas angka melek huruf (AMH) menurut kelompok umur 15 tahun keatas berdasarkan jenis kelamin di Kota Dumai Tahun 2019 pada huruf latin jenis kelamin laki-laki berjumlah 99,71 % dan perempuan 79,57 %, sedangkan huruf lainnya usia \geq 15 tahun laki berjumlah 99,31 % dan perempuan 75,30 %.

3.2.3 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan Tahun 2020

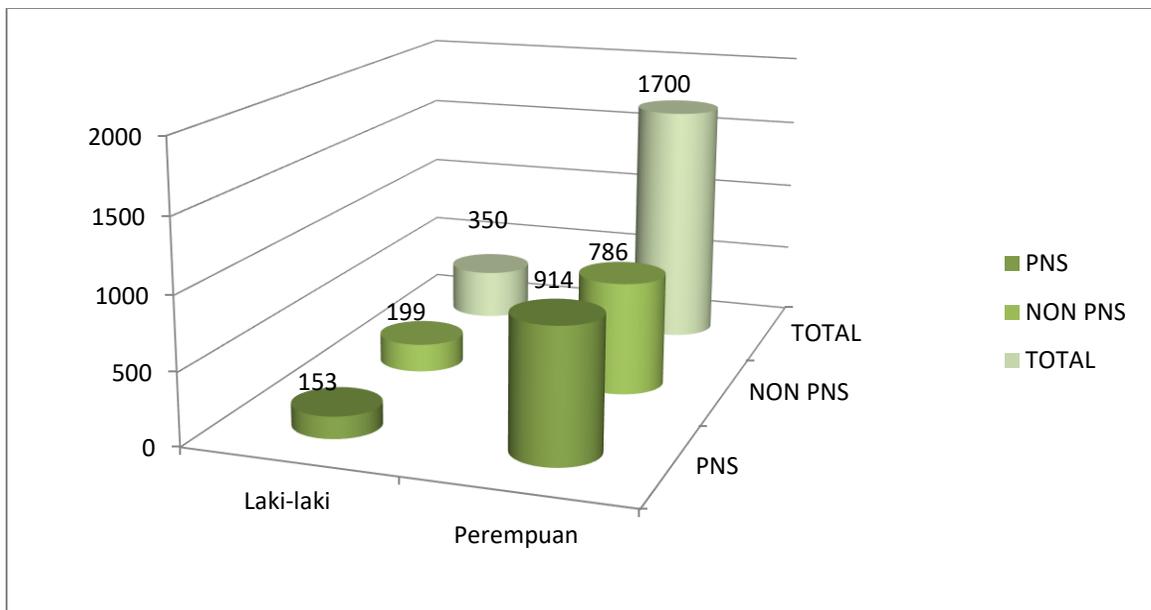
JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR	TIDAK/BELUM SEKOLAH	MASIH SEKOLAH (SD SMP SMA)	TIDAK SEKOLAH LAGI
	2020	2020	2020
LAKI - LAKI	0,45	72,22	27,33
PEREMPUAN	0,00	76,17	23,82

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai

Berdasarkan tabel diatas Persentase Penduduk Umur 07-24 Tahun Menurut menurut Karakteristik dan Status Pendidikan Tahun 2020 terlihat pada tabel 3.1

Jumlah Guru Negeri/Swasta Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Di Kota Dumai Tahun 2020

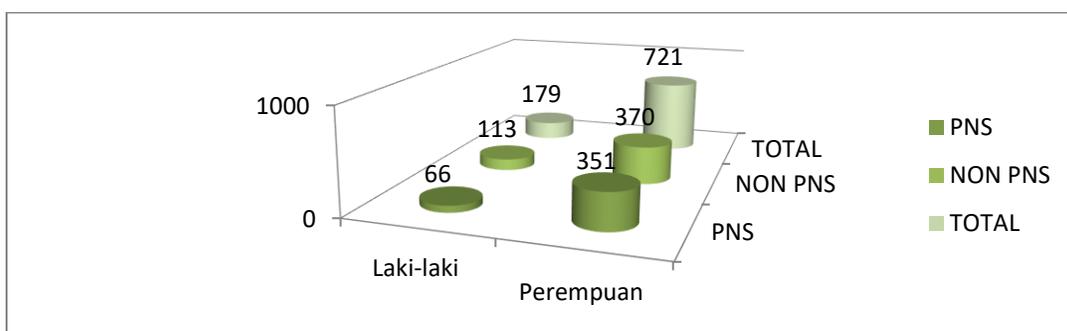
Gambar 6. Jumlah Guru Negeri/Swasta di Sekolah Dasar (SD)



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai

Berdasarkan Gambar diatas jumlah guru negeri/swasta menurut jenis kelamin laki-laki untuk guru SD pada tahun 2020 yang PNS berjumlah 151 orang, Non PNS berjumlah 199 orang total 350 orang. Jenis kelamin perempuan untuk guru SD yang PNS berjumlah 914 orang, Non PNS berjumlah 786 orang total 1700 orang.

Gambar. 7 Jumlah Guru Negeri/Swasta di Sekolah Menengah Pertama (SMP)



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2020

Berdasarkan Gambar diatas jumlah guru negeri/swasta menurut jenis kelamin laki-laki untuk guru SMP pada tahun 2020 yang PNS berjumlah 66 orang, Non PNS berjumlah 113 orang total 179 orang. Jenis kelamin perempuan untuk guru SMP yang PNS berjumlah 351 orang, Non PNS berjumlah 370 orang total 721 orang.

3.3 DATA GENDER BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Angka kematian ibu (AKI), bersalin dan nifas juga merupakan bagian dari isu perempuan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih sangat tinggi bila

dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kebijakan Departemen Kesehatan dalam upaya mempercepat penurunan AKI pada dasarnya mengacu kepada intervensi strategis "Empat Pilar Safe Motherhood", yaitu pilar pertama Keluarga Berencana (Ekarini 2008).

Salah satu upaya pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan perempuan adalah dibidang kesehatan dan Keluarga Berencana (KB). Kesehatan perempuan dapat diukur berdasarkan kualitas fisik perempuan melalui indikator angka harapan hidup perempuan dapat diukur melalui angka kesakitan (morbidity rate), yaitu penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitasnya disertai jenis-jenis keluhannya. Untuk melihat gambaran tentang upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi perempuan dapat dilihat melalui akses penduduk perempuan ke pelayanan kesehatan, meliputi cara berobat, jenis-jenis obat yang digunakan, dan fasilitas tempat berobat.

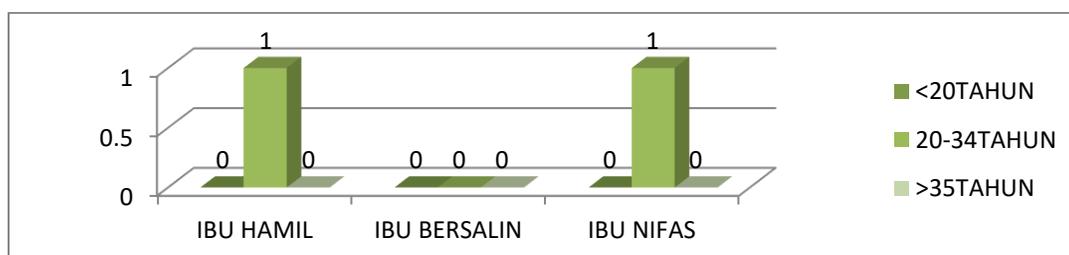
Program Keluarga Berencana (KB) juga merupakan upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Indikator yang digunakan meliputi status pemakaian alat/cara KB, jenis-jenis alat KB yang digunakan dan anak lahir hidup. Sementara itu usia perkawinan pertama dapat mempengaruhi seseorang dalam status pemakaian alat/cara KB. Semakin rendah usia perkawinan pertama seorang perempuan, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan. Hal ini disebabkan belum siapnya perempuan secara fisik dan mental dalam menghadapi masa kehamilan dan melahirkan. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan peran serta perempuan secara langsung untuk mendukung program Keluarga Berencana, yaitu pemakaian alat kontrasepsi.

Program Keluarga Berencana (KB) juga merupakan upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Indikator yang digunakan meliputi status pemakaian alat/cara KB, jenis-jenis alat KB yang digunakan dan anak lahir hidup. Sementara itu usia perkawinan pertama dapat mempengaruhi seseorang dalam status pemakaian alat/cara KB. Semakin rendah usia perkawinan pertama seorang perempuan, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan. Hal ini disebabkan belum siapnya perempuan secara fisik dan mental dalam menghadapi masa kehamilan dan melahirkan. Oleh karena itu perlu

diantisipasi dengan peran serta perempuan secara langsung untuk mendukung program Keluarga Berencana, yaitu pemakaian alat Kontrasepsi.

3.3.1 Angka Kematian Ibu

Gambar.8 Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur Kota Dumai Tahun 2020

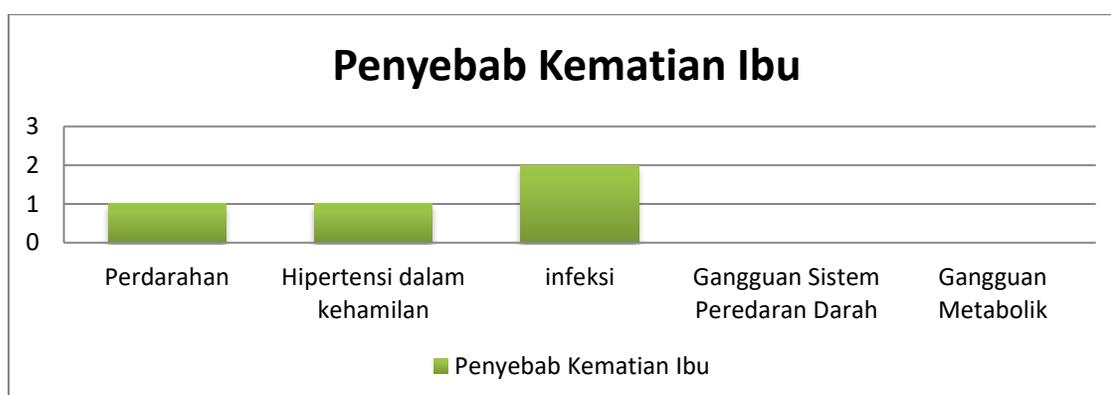


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai

Terdapat total 2 kematian ibu, yaitu saat saat kondisi ibu hamil 1 kasus, saat persalinan 0 kasus, dan saat nifas 1 kasus (lihat Gambar 8).

Selain kematian ibu hamil, ada klasifikasi kematian ibu pasca melahirkan yaitu sejumlah 2 kasus (lihat Gambar.8). Penyebab paling banyak kematian ibu pasca melahirkan adalah Hipertensi dalam Kehamilan sebanyak 3 kasus(lihat Gambar.9).

Gambar.9 Jumlah Penyebab Kematian Ibu Kota Dumai Tahun 2020

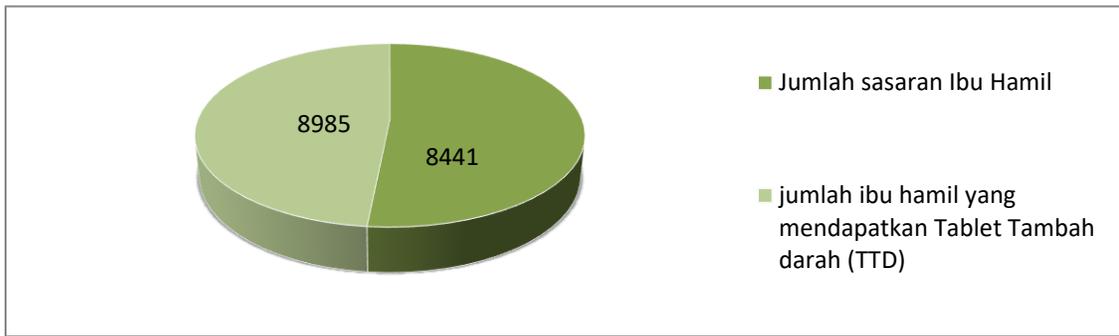


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai

3.3.2 Layanan Kesehatan untuk Ibu Hamil

Salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada ibu hamil adalah dengan memberikan tablet zat besi.

Gambar.10 Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)

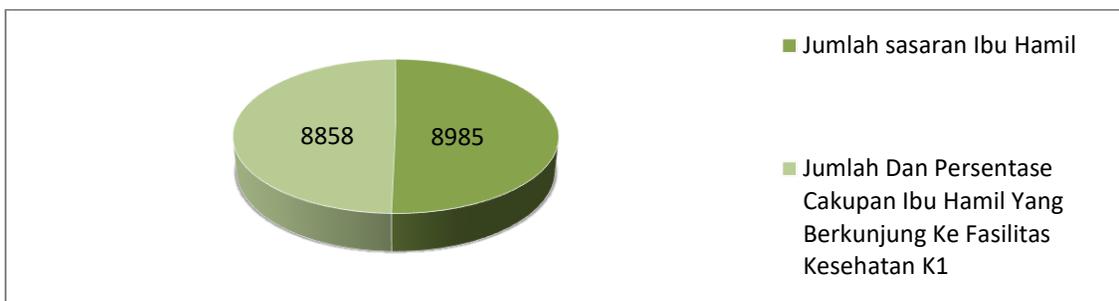


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai

Berdasarkan Gambar.10 Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) dari jumlah ibu hamil 8985 Orang, yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) sebanyak 8441 Orang dari sasaran ibu hamil.

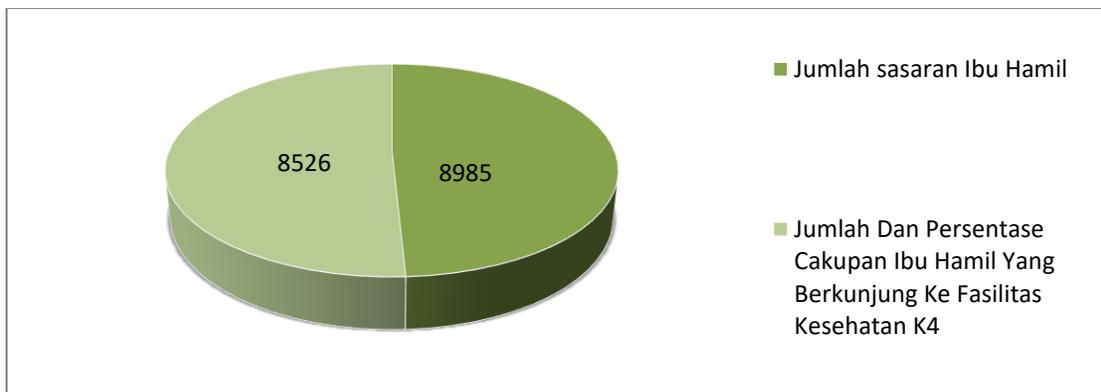
Selain pemberian zat besi, jumlah kunjungan K1 ibu hamil juga merupakan hal perlu diungkapkan. Dari Gambar 11 terlihat, Jumlah Dan Persentase Cakupan Ibu Hamil Yang Berkunjung Ke Fasilitas Kesehatan K1, dari jumlah sasaran ibu hamil 8985 orang yang melakukan kunjungan K1 sebanyak 8858 orang dari sasaran ibu hamil dan Jumlah Dan Persentase Cakupan Ibu Hamil Yang Berkunjung Ke Fasilitas Kesehatan K4, dari jumlah sasaran ibu hamil 8985 orang yang melakukan kunjungan K4 sebanyak 8526 orang dari sasaran ibu hamil.

Gambar 11. Jumlah Dan Persentase Cakupan Ibu Hamil Yang Berkunjung Ke Fasilitas Kesehatan K1



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai

Gambar 12. Jumlah Dan Persentase Cakupan Ibu Hamil Yang Berkunjung Ke Fasilitas Kesehatan K4

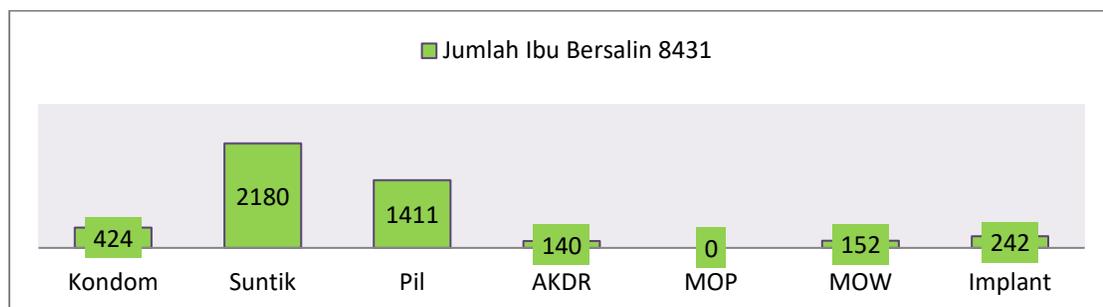


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai

3.3.3 Kepesertaan Keluarga Berencana

Dalam Keluarga Berencana masalah utama yang kita hadapi saat ini adalah rendahnya partisipasi laki-laki dalam pelaksanaan program KB dan Kesehatan Reproduksi (Ekarini 2008).

Gambar 13. Cakupan dan Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan menurut Jenis Kontrasepsi Kota Dumai Tahun 2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai

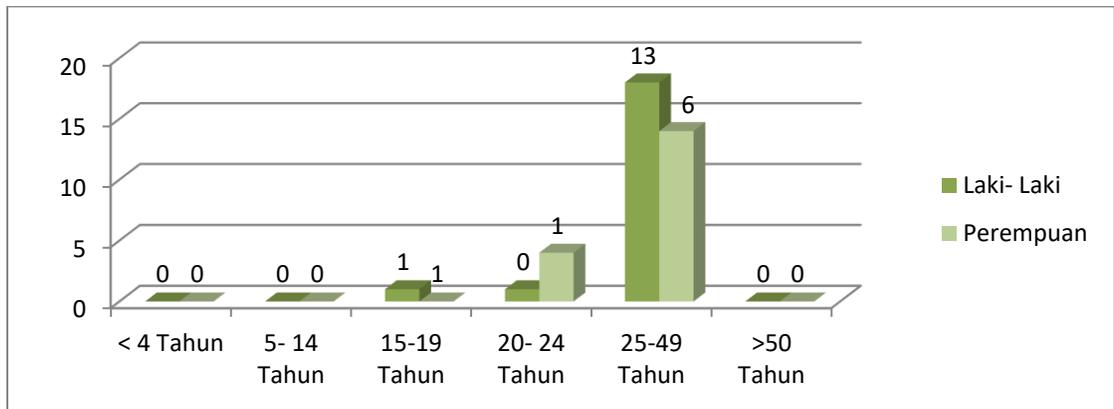
Berdasarkan Gambar 13 dapat dilihat Kepesertaan Keluarga Berencana terbanyak menurut Jenis Kontrasepsi Kota Dumai Tahun 2020 adalah penggunaan suntik yaitu sebanyak 2180 orang dan total penggunaan Kontrasepsi Kota Dumai berjumlah 4549 orang.

3.3.4 Penderita Hiv dan AIDS

HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah jenis virus yang menyerang/menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi HIV. Akibat menurunnya

kekebalan tubuh maka orang tersebut sangat mudah terkena berbagai penyakit infeksi (infeksi oportunistik) yang sering berakibat fatal (Kemenkes RI, 2014).

Gambar 14. Jumlah Penderita HIV Menurut Jenis Dan Kelompok Umur Kota Dumai Tahun 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Berdasarkan Gambar. 14 di atas bahwa Penderita Hiv umur <4 Tahun berjumlah 0, umur 5-14 Tahun berjumlah 0, umur 15-19 Tahun berjumlah 2 orang, umur 20-24 Tahun berjumlah 1 orang, umur 25-49 Tahun berjumlah 19 orang, dan umur >50 Tahun berjumlah 0 orang.

Salah satu hambatan paling besar dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia adalah masih tingginya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Stigma berasal dari pikiran seorang individu atau masyarakat yang memercayai bahwa penyakit AIDS merupakan akibat dari perilaku amoral yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Stigma terhadap ODHA tergambar dalam sikap sinis, perasaan ketakutan yang berlebihan, dan pengalaman negatif terhadap ODHA. Banyak yang beranggapan bahwa orang yang terinfeksi HIV/AIDS layak mendapatkan hukuman akibat perbuatannya sendiri. Mereka juga beranggapan bahwa ODHA adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penularan HIV/AIDS (Maman et al 2008). Di Grogan Jawa Tengah ditemukan bahwa pemberian stigma terhadap ODHA di Kabupaten Grobogan dipengaruhi oleh sikap keluarga terhadap ODHA dan persepsi responden terhadap ODHA. Responden yang berasal dari keluarga dengan sikap negatif terhadap ODHA memiliki kemungkinan empat kali lebih besar memberikan stigma terhadap ODHA, sedangkan responden dengan sikap negatif terhadap ODHA memiliki

kemungkinan dua kali lebih besar dalam memberikan stigma terhadap ODHA (Shaluhiah et al 2015).

Penelitian Brown et al (2003) menguji intervensi untuk meningkatkan kemauan untuk mengobati ODHA di antara penyedia layanan kesehatan atau meningkatkan strategi mengatasi untuk menangani stigma AIDS di antara ODHA atau kelompok berisiko. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa intervensi pengurangan stigma tampaknya berhasil, setidaknya dalam skala kecil dan dalam jangka pendek, tetapi banyak kesenjangan tetap terutama terkait dengan skala dan durasi dampak dan dalam hal dampak gender dari intervensi pengurangan stigma. Sehingga usaha-usaha pengurangan stigma ini harus secara masif dilakukan oleh pemerintah maupun civil society.

Tabel 3.2 Jumlah Kasus dan Kematian Akibat AIDS Menurut Jenis Dan Kelompok Umur Kota Dumai Tahun 2020

NO	KELOMPOK UMUR	KASUS BARU AIDS				KASUS KAMULATIF AIDS				JUMLAH KEMATIAN AKIBAT AIDS		
		L	P	L+P	PROPORSI	L	P	L+P	PROPORSI	L	P	L+P
					KLP UMUR				KLP UMUR			
1	<1 TAHUN	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-
2	1-4TAHUN	-	-	-	-	0	1	1	10,4	-	-	-
4	5 -14 TAHUN	-	-	-	-	2	0	2	20,0	-	-	-
5	15 - 19 TAHUN	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-
6	20 - 29 TAHUN	2	1	3	30,0	67	33	100	1000	29	19	48
7	30-39 TAHUN	2	2	4	40,0	105	49	154	1540,	46	13	59
8	40-49TAHUN	1	1	2	20,0	18	6	24	240,0	6	4	10
9	50-59TAHUN	-	-	-	-	5	6	11	37,9	-	-	-
10	≥ 60 TAHUN	1	0	1	3,4	1	0	1	3,4	-	-	-
8	TIDAK DIKETAHUI	-	-	-	-	5	6	11	110,0	-	-	-
JUMLAH (KAB/KOTA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROPORSI JENIS KELAMIN		60,0	40,0	-	-	67,7	32,3	-	-	70,1	29,9	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

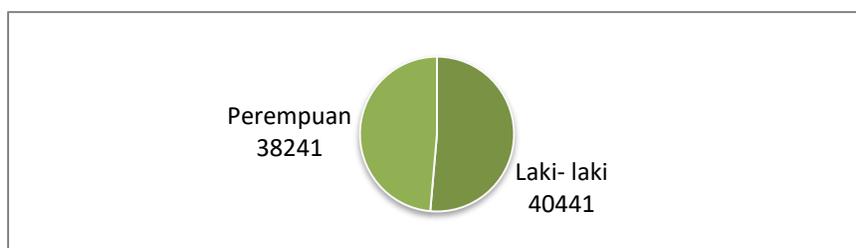
Berdasarkan Tabel 3.2 di atas bahwa Jumlah Kasus dan Kematian Akibat AIDS Menurut Jenis Dan Kelompok Umur Kota Dumai Tahun 2020 terbanyak pada kasus baru AIDS Umur 30-39 Tahun berjumlah 59 orang.

3.4 DATA GENDER BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang lazim dipergunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan. Dalam temuan penelitiannya Siregar dan Wahyuniarti (2007) mengatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin walaupun dengan magnitude yang relatif kecil, seperti inflasi, populasi penduduk, share sektor pertanian dan sektor industri.

Namun, variabel yang signifikan dan relatif besar pengaruhnya terhadap penurunan jumlah penduduk miskin adalah sektor pendidikan. Grafik menunjukkan angka kemiskinan di Kota Dumai adalah 26,158%, dengan jumlah penduduk miskin 79,016 jiwa.

Gambar 15. Jumlah Fakir miskin di Kota Dumai Tahun 2020



Sumber : Dinas Sosial Kota Dumai

Masih menurut Siregar dan Wahyuniarti (2007) berdasarkan temuan penelitian yang mereka lakukan kebijakan yang perlu ditempuh untuk mengurangi penduduk miskin adalah pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang merupakan syarat keharusan. Disamping itu diperlukan pula syarat kecukupan dengan mempercepat industrialisasi pertanian/perdesaan, akumulasi modal manusia, pengendalian inflasi untuk mempertahankan daya beli masyarakat, dan pengendalian secara efektif pertumbuhan penduduk terutama masyarakat miskin.

Data bidang ekonomi berikut ini, akan memberikan gambaran kepada kita kinerja perempuan dan laki-laki pada setiap sub sektornya.

Tabel 3.3 Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja

KEGIATAN UTAMA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	
Angkatan Kerja	92.105	54.481	146.586

Bekerja	85.144	49.437	134.581
Pengangguran	6.961	5.044	12.005
Bukan Angkatan Kerja	19.551	52146	71.697
Sekolah	9.578	8.784	18.632
Mengurus Rumah Tangga	2.780	39.829	42.609
Lainnya	7.193	3.533	10.726
Jumlah	111.656	106.627	218.283
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	82.49	51.09	67.15
Tingkat Pengangguran	7.56	9.26	8.19

Sumber: Dumai Dalam Angka 2021, BPS Kota Dumai

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas Jumlah angkatan kerja yang bekerja yang tertinggi yaitu laki- laki 85.144 orang dan yang pengangguran yang yang tertinggi yaitu laki- laki 6.961 dan jumlah bukan angkatan kerja yang tertinggi mengurus rumah tangga yaitu perempuan dengan jumlah 39.829 orang.

**Tabel 3.4 Data Pertumbuhan UMKM Berdasarkan Sektor Di Kota Dumai
Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM**

No	SEKTOR	2020			
		Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Kerajinan	16	-	-	16
2	Olahan Makan / Minuman	443	-	-	443
3	Perikanan	4	-	-	4
4	Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan	19	-	-	19
5	Peternakan	6	-	-	6
6	Perdagangan	527	-	-	527
7	Jasa	113	-	-	113
8	Inovatif dan Kreatif	4	-	-	4
9	Konveksi	19	-	-	19
	TOTAL	1.151			1.151

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM berdasarkan sektor di kota Dumai yang tertinggi pada sektor perdagangan yaitu 527 selanjutnya sektor olahan makanan/ minuman 443 sektor.

**Tabel 3.5 Jumlah Pengelola Usaha Kecil Mikro Dan Menengah (UMKM)
Menurut Jenis Kelamin Di Kota Dumai**

No	Kecamatan	Jumlah pengelola Usaha Mikro dan Kecil		L+P	Jumlah Yang Pernah Mengikuti Pelatihan		L+P	Jumlah Pengelola usaha menengaha		L+P	Jumlah Yang Pernah Mengikuti Pelatihan		L+P
		L	P		L	P		L	P		L	P	
1	Dumai Kota	73	84	157	0	8	8	-	-	-	-	-	-
2	Dumai Barat	100	62	162	1	6	7	-	-	-	-	-	-
3	Dumai Timur	72	102	174	3	15	18	-	-	-	-	-	-
4	Bukit Kapur	72	89	161	3	7	10	-	-	-	-	-	-
5	Sungai Sembilan	76	91	167	1	5	6	-	-	-	-	-	-
6	Medang Kampai	71	89	160	2	1	3	-	-	-	-	-	-
7	Dumai Selatan	85	85	170	3	7	10	-	-	-	-	-	-
	KOTA DUMAI	549	602	1151	13	49	62	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Tabel 3.5 diatas menunjukkan bahwa jumlah pengelola usaha kecil menurut jenis kelamin di Kota Dumai jumlah total pengelola usaha mikro dan kecil terbanyak laki-laki yaitu 549 dan jumlah yang pernah mengikuti pelatihan yaitu perempuan sebanyak 49 orang.

3.5 DATA GENDER BIDANG PEMERINTAHAN

3.5.1 DATA APARATUR SIPIL NEGARA

Tabel 3.6 Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Pendidikan Dan Unit Kerja Di Kota Dumai

JUMLAH ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN																						
NO	OPD	S3		S2		S1		DIV		DIII		DII		DI		SLTA		SLTP		SD		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	5	2	5	7	1	1	1	2	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	30
2	Badan Narkotika Nasional Kota Dumai	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	2	0	7	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	33
4	Badan Pendapatan Daerah	0	0	6	2	6	12	0	0	5	3	0	0	1	0	2	5	11	0	0	0	71
5	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0	0	3	0	16	11	2	0	3	3	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	53
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	12	3	10	4	2	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	35
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0	0	2	1	4	8	0	0	3	4	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	27

9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	2	2	9	8	1	0	1	2	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	32
10	Dinas Kesehatan (Tidak termasuk UPT RSUD)	0	0	8	2	20	95	0	19	18	2	0	0	0	0	8	26	0	0	0	0	438
11	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai	0	0	23	1	20	74	3	11	21	0	0	0	2	0	7	18	0	0	0	0	299
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	0	8	7	16	22	0	1	2	2	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	66
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	5	0	10	5	1	0	3	0	1	0	0	0	4	3	1	0	0	0	33
14	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	7	2	9	11	2	0	1	0	0	0	0	0	3	4	0	0	3	0	42
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	6	0	33	14	1	0	3	2	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	78
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0	8	0	12	0	3	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	1	5	8	17	2	1	3	2	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	47
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	1	13	3	22	11	0	0	4	2	2	62	0	5	4	87	8	1	2	0	1703
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	0	2	2	3	9	0	3	1	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	27
20	Dinas Perdagangan	0	0	5	2	9	8	0	0	3	4	0	0	0	0	7	2	0	0	1	0	41
21	Dinas Perhubungan	0	0	8	0	19	5	0	0	3	4	0	0	0	0	3	2	0	0	1	0	76
22	Dinas Perikanan	0	0	2	4	9	6	2	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	29
23	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	0	4	3	7	10	0	0	1	1	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	36
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0	1	4	8	0	0	2	9	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	27
25	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0	0	4	1	9	3	0	0	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	24
26	Dinas Sosial	0	0	1	3	6	4	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	19
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	1	1	11	8	0	0	0	3	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	29
28	Inspektorat	1	0	10	3	14	9	1	0	2	3	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	47
29	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0	0	4	0	3	6	5	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	23
30	Kecamatan Bukit Kapur	0	0	3	0	18	8	0	0	2	0	0	0	0	0	1	9	1	1	0	0	53
31	Kecamatan Dumai Barat	0	0	4	0	9	13	1	0	1	3	0	0	0	0	4	5	0	0	0	0	40
32	Kecamatan Dumai Kota	0	0	5	1	10	21	0	2	1	0	1	0	0	1	3	4	1	0	0	0	50
33	Kecamatan Dumai Selatan	0	0	4	1	12	13	3	1	5	2	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	49
34	Kecamatan Dumai Timur	0	0	2	1	8	12	2	0	1	3	1	0	0	0	5	6	0	0	0	0	41
35	Kecamatan Medang Kampai	0	0	2	0	11	12	1	0	1	1	0	0	1	0	7	6	0	0	0	0	42
36	Kecamatan Sungai Sembilan	0	0	6	1	15	7	0	0	2	0	0	0	0	0	9	6	1	0	0	0	47
37	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	2	0	12	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	48
38	Sekretariat Daerah	2	0	16	9	32	18	5	2	4	3	0	0	1	0	2	11	0	0	0	0	125
39	Sekretariat DPRD	0	0	3	0	5	13	0	0	0	2	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	42
40	Sekretariat KPU	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	7
	JUMLAH	3	1	19	1	62	16	35	44	99	4	2	62	5	8	3	26	1	2	7	0	3946

Berdasarkan Tabel 3.6 diatas jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Pendidikan dan Unit Kerja di Kota Dumai jumlah yang tertinggi di OPD Dinas pendidikan dan kebudayaan yaitu 1703 orang.

Tabel 3.7 Jumlah Personil polisi Se- Kota Dumai

Tahun 2020

NO	PANGKAT	LAKI- LAKI	PEREMPUAN
1	AKBP	1	-
2	KOMPOL	5	1
3	AKP	20	4
4	IPTU	32	3
5	IPDA	23	-
6	AIPTU	48	1
7	AIPDA	91	2
8	BRIPKA	164	8
9	BRIGADIR	45	3
10	BRIPTU	49	13
11	BRIPDA	19	2
12	SIPIIL (PNS)	6	10
	JUMLAH	503	47

Sumber : Polres Kota Dumai

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa Personil Polisi Laki- laki berjumlah 503 orang dan personil perempuan berjumlah 47 orang.

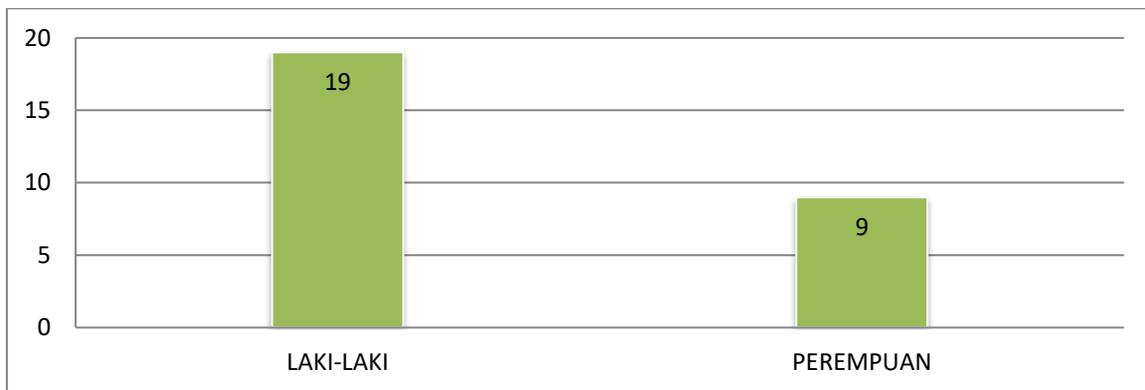
**Tabel 3.8 Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Menurut Jenis Kelamin
Di Kota Dumai Tahun 2020**

JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	KET
	2020	2020	-
Ketua	1	-	-
Wakil Ketua	-	1	-
Hakim	6	2	-
Panitera	1	-	-
Plt. Sekretaris	1	-	-
Panitera Muda Pidana	1	-	-
Panitera Muda Perdata	1	-	-
Panitera Muda Hukum	1	-	-
Panitera Pengganti	2	2	-
Plt. Kasubbag Umum Dan Keuangan	-	1	-
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana	-	1	Rangkap Jabatan Plt. Kasubbag Umum & Keuangan
Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	-	Rangkap Jabatan Plt. Sekretaris
Jurusita	1	-	-
Jurusita Pengganti	2	2	-
Staff	3	2	-
TOTAL	21	11	-

Sumber: Pengadilan Negeri Dumai Kelas I A

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai Pengadilan Negeri pada Tahun 2020 yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 21 orang dan perempuan 11 orang.

Gambar. 16 Jumlah Pegawai Kejaksaan Negeri Menurut Jenis Kelamin Di Kota Dumai Tahun 2020



Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Dumai

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai Kejaksaan pada Tahun 2020 yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 19 orang dan perempuan 9 orang.

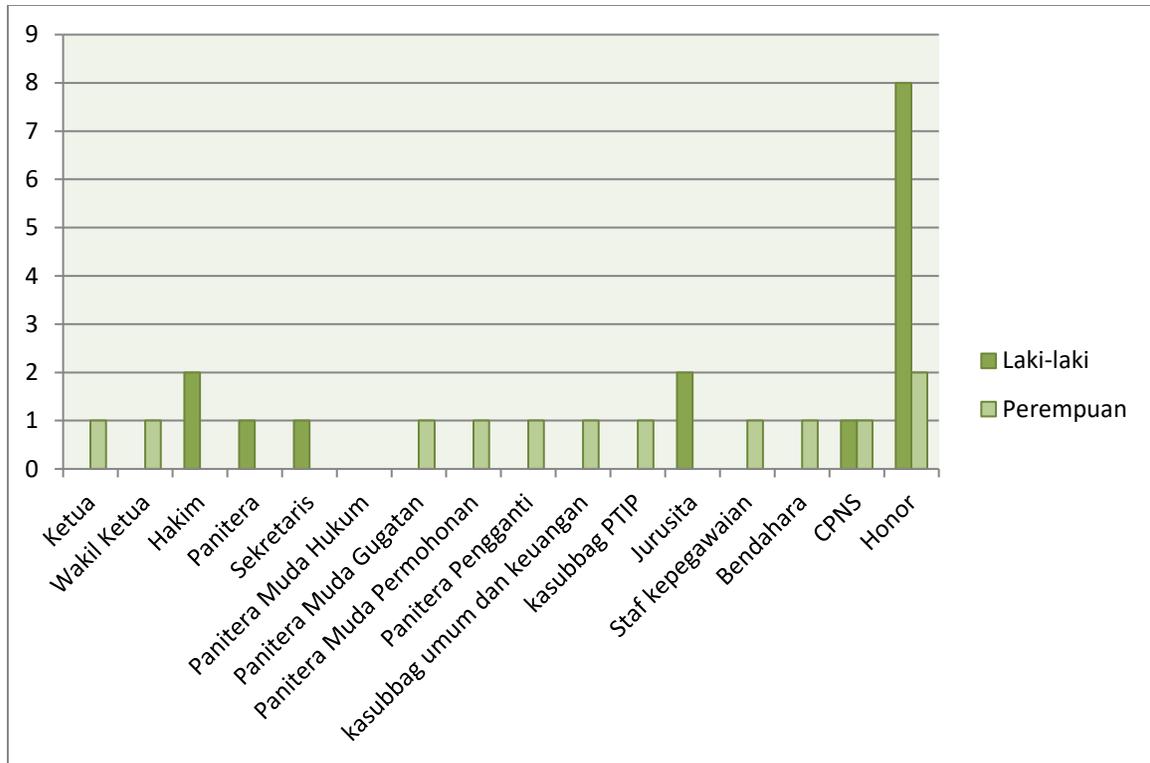
Gambar 17. Jumlah Pegawai Imigrasi Menurut Jenis Kelamin Di Kota Dumai Tahun 2020



Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II Dumai

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai imigrasi pada Tahun 2020 yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 33 orang dan perempuan 13 orang.

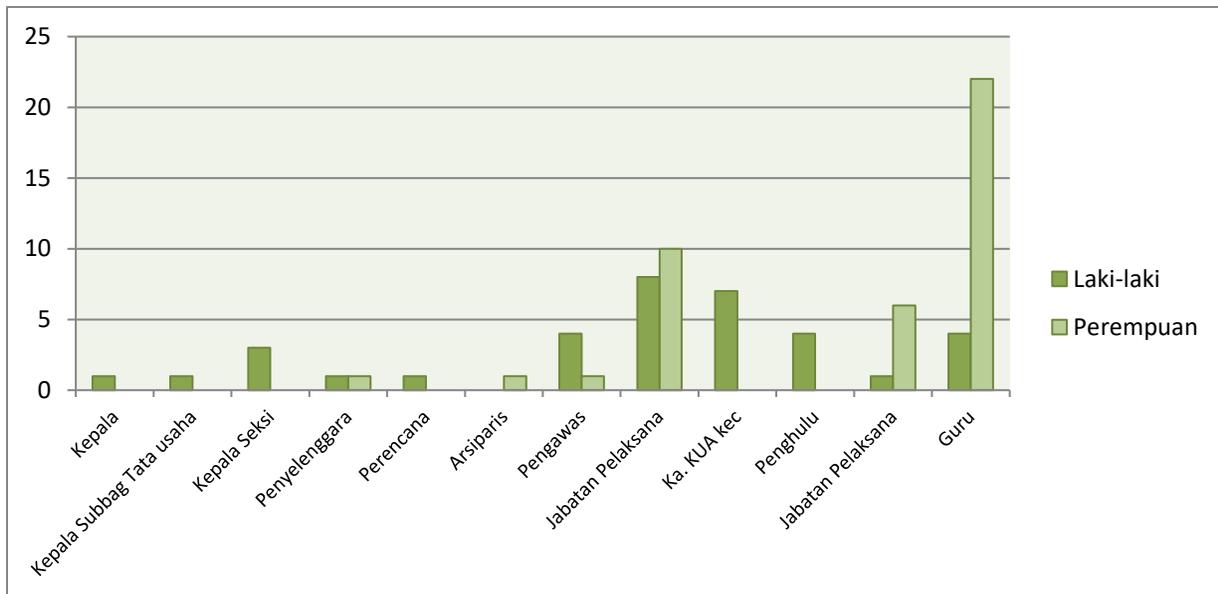
Gambar 18. Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Menurut Jenis Kelamin Di Kota Dumai Tahun 2020



Sumber: Pengadilan Agama Kota Dumai

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai Pengadilan Agama pada Tahun 2020 yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 15 orang dan perempuan 12 orang.

Gambar 19. Jumlah Pegawai Kementerian Agama Menurut Jenis Kelamin Di Kota Dumai Tahun 2020



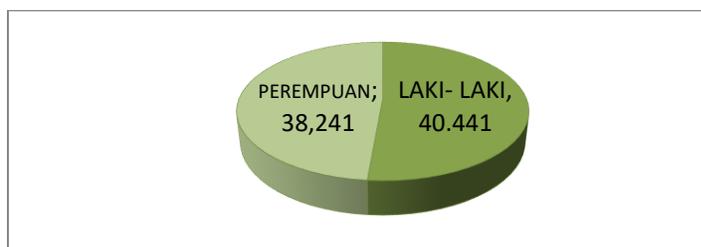
Sumber:Kementerian Agama Kota Dumai

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai Kementerian Agama pada Tahun 2020 yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 35 orang dan perempuan 41 orang.

3.6 DATA GENDER BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN

Kemiskinan merupakan masalah yang rumit seakan-akan menjadi persoalan abadi seperti sebuah lingkaran yang tidak ada ujungnya dan selalu berputar semakin membesar serta berdampak semakin luas. Dinas Sosial merupakan instansi yang berwenang dalam mensejahterakan kehidupan sosial masyarakat. Kewenangan kegiatan ketertiban sosial yang merupakan bagian dari pembangunan dibidang kesejahteraan sosial. Kewenangan yang luas dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah tersebut, (dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat dan menantang (Rinaldi 2016).

Gambar 20. Jumlah Farkir Miskin Kota Dumai Tahun 2020



Sumber:Dinas Sosial Kota Dumai

Tabel 3.9 Jumlah Panti Sosial Menurut kecamatan di Kota Dumai Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH PANTI ASUHAN	JUMLAH ANAK ASUH	
			2020	
			L	P
1	DUMAI BARAT	2	16	66
2	DUMAI TIMUR	2	8	33
3	DUMAI SELATAN	3	98	84
4	DUMAI KOTA	1	18	24
5	SEI SEMBILAN	1	33	29
6	BUKIT KAPUR	2	18	60
7	MEDANG KAMPAI	1	29	30
	TOTAL	12	220	326

Sumber: Dinas sosial Kota Dumai

Berdasarkan Tabel 3.9 diatas menunjukkan bahwa Jumlah Panti Sosial Menurut kecamatan di Kota Dumai dengan penghuni panti terbanyak ada

dikecamatan Dumai Selatan yaitu jumlah Laki- laki 98 orang dan perempuan 84 Orang.

Tabel 4.0 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Dumai Tahun 2020

MASALAH SOSIAL												TOTAL	
ANAK TERLANTAR (Jiwa)		ANAK BALITA TERLANTAR (Jiwa)		ANAK DENGAN DISABILITAS (Jiwa)		PENYANDANG DISABILITAS (Jiwa)		LANSIA TERLANTAR (Jiwa)		FAKIR MISKIN (KK)			
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
21	4	165	142	0	0	185	162	180	243	40.441	38.241	41.014	38.827
25		307		0		347		423		78.682		79.841	

Berdasarkan Tabel 4.0 diatas menunjukkan bahwa Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Dumai terbanyak adalah farkir miskin berjumlah 78.682 Orang.

3.7 DATA ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN

3.7.1 Bidang Politik

Menurut penelitian Hilman (2018) potensi kuota gender untuk meningkatkan perwakilan parlemen perempuan diyakini telah berkontribusi pada peningkatan yang stabil dalam porsi kursi parlemen perempuan, ada variasi yang signifikan di seluruh wilayah dan negara. Kearifan konvensional menyatakan bahwa faktor budaya adalah kendala utama pada potensi kuota gender untuk memberikan lebih banyak kursi bagi kandidat perempuan. Pengalaman Indonesia menyarankan sebaliknya. Meskipun faktor budaya tetap menjadi penghalang bagi masuknya perempuan Indonesia ke kantor terpilih, faktor budaya tidak menjelaskan naik turunnya representasi deskriptif (numerik) perempuan di parlemen selama dua siklus pemilu terakhir. Temuan-temuan dari studi ini menunjukkan bahwa faktor-faktor institusional, terutama perubahan pada sistem pemungutan suara dan

konsekuensi untuk pendanaan kampanye, menghadirkan tantangan yang lebih berat bagi kemajuan perempuan dalam politik partai dan politik parlementer Indonesia.

Tabel 4.1 Jumlah Anggota Legistalif Kota Dumai

NO	NAMA PARTAI	ANGGOTA LEGISLATIF		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0	0	0
2	Gerakan Indonesia Raya	3	0	3
3	Pdi Perjuangan	4	0	4
4	Golongan Karya	3	0	3
5	Nasdem	2	2	4
6	Gerakan Perubahan Indonesia	0	0	0
7	Berkarya	0	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	4	0	4
9	Partai Persatuan Indonesia	3	0	3
10	Partai persatuan Pembangunan	0	0	0
11	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional	3	0	3
13	Hati Nurani Rakyat	1	0	1
14	Demokrat	5	0	5
15	Partai Bulan Bintang	0	0	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	0
dst	JUMLAH	28	2	30

SUMBER : KPU KOTA DUMAI

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan jumlah anggota legislatif perempuan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah laki- laki, yaitu laki- laki 28 orang dan perempuan 2 orang.

3.7.2 Data Organisasi Perempuan

Organisasi Perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan. Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi organisasi perempuan khususnya dalam bidang pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari komitmen yang tinggi melalui manajemen yang di terapkan serta peningkatan kinerja individu pada organisasi tersebut. Apabila organisasi atau kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan terkelola dengan baik maka pembangunan pemberdayaan perempuan akan bisa lebih eksis dan lebih optimal. Tahun 2020 terdapat 34 Organisasi perempuan yang terdaftar di Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Dumai.

TABEL 4.2 Jumlah Organisasi Perempuan Kota Dumai Tahun 2019-2020

No	2019		2020	
	NAMA ORGANISASI	JML	NAMA ORGANISASI	JML
1	1. Adhiyaksa Dharma Karini 2. Al-Hidayah 3. Aisyah 4. Bhayangkari 5. PT.Chevron 6. DW Persatuan/Kota 7. Dharma Yukti Karini 8. Persatuan Keluarga Pacitan Dumai (PKPD) 9. IBI 10.IIDI 11.Ikatan Keluarga Dewan (IKD) 12.Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) 13.Ikatan Wanita Minang Riau (IWMR) 14.Ikatan Guru Taman Kanak (IGTK) 15.Ikatan Keluarga Sakinah (IKS) 16.Ikatan Keluarga Jawa Sumatera (IKJS) 17.Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) 18.IKKT 19.JALA SENASTRI 20.MUSLIMAT NU 21.NAVIGASI 22.NURUL HIDAYAH 23.HWDI 24.PKK KOTA DUMAI 25.PELINDO (PERISPINDO) 26.Persatuan Wanita Patra (PWP) 27.PERSID KODIM 28.PERSIT POM 29.PT. SAN 30.RUDAL 004 31.SYAHBANDAR 32.TIARA KUSUMA 33.WADUYA 34. HIPEMI	34	1. Adhiyaksa Dharma Karini 2. Al-Hidayah 3. Aisyah 4. Bhayangkari 5. PT.Chevron 6. DW Persatuan/Kota 7. Dharma Yukti Karini 8. Persatuan Keluarga Pacitan Dumai (PKPD) 9. IBI 10.IIDI 11.Ikatan Keluarga Dewan (IKD) 12.Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) 13.Ikatan Wanita Minang Riau (IWMR) 14.Ikatan Guru Taman Kanak (IGTK) 15.Ikatan Keluarga Sakinah (IKS) 16.Ikatan Keluarga Jawa Sumatera (IKJS) 17.Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) 18.IKKT 19.JALA SENASTRI 20.MUSLIMAT NU 21.NAVIGASI 22.NURUL HIDAYAH 23.HWDI 24.PKK KOTA DUMAI 25.PELINDO (PERISPINDO) 26.Persatuan Wanita Patra (PWP) 27.PERSID KODIM 28.PERSIT POM 29.PT. SAN 30.RUDAL 004 31.SYAHBANDAR 32.TIARA KUSUMA 33.WADUYA 34. HIPEMI 35.WKRI 36.PERSADA 37.PLSALIMAH 38.SA DWP KEMENAG 39.BKMT 40.PERWOSI 41.PERWIRA	41

Sumber Data : GOW Kota Dumai

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan jumlah organisasi perempuan di kota dumai meningkat di bandingkan pada tahun 2021 yaitu 41 organisasi.

3.7.3 Data Kelompok Tani

Tabel 4.3 Jumlah Kelompok Tani Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota		L + P
			L	P	
Bukit Kapur	Kelurahan Bukit Kayu Kapur	33	557	101	658
	Kelurahan Bagan Besar	50	807	90	897
	kelurahan Bukit Nenas	16	213	26	239
	Kelurahan Kampung Baru	36	619	145	764
Dumai Timur	Kelurahan Bukit Batrem	13	141	34	175
	Kelurahan Buluh Kasap	4	15	38	53
	kelurahan Jaya Mukti	1	0	14	14
	Kelurahan Teluk Binjai	8	78	68	146
Sungai Sembilan	Kelurahan Tanjung Palas	12	136	51	187
	Kelurahan Lubuk Gaung	52	783	110	893
	Kelurahan Bangsal Aceh	10	153	45	198
	kelurahan Basilam Baru	52	819	106	925
	Kelurahan Batu Teritip	35	588	20	608

Medang Kumpai	Kelurahan Teluk Makmur	9	130	12	142
	Kelurahan Guntung	10	120	33	153
	kelurahan Mundam	8	77	81	158
	Kelurahan Pelitung	14	192	75	267
Dumai Selatan	Kelurahan Bukit Datuk	6	90	42	132
	Kelurahan Bukit Timah	11	92	98	190
	kelurahan Bumi Ayu	5	40	59	99
	Kelurahan Mekar Sari	15	155	110	265
	Kelurahan Ratu Sima	1	0	22	22
Dumai Kota	Kelurahan Dumai Kota	1	2	13	15
	Kelurahan Laksmana	2	9	42	51
	kelurahan Rimba Sekampung	2	0	38	38
	Kelurahan Sukajadi	4	23	41	64
Dumai Barat	Kelurahan Bagan Keladi	20	286	188	474
	Kelurahan Pangkalan Sesai	5	77	37	114
	kelurahan Purnama	11	90	120	210
	Kelurahan STDI	1	7	1	8

Berdasarkan tabel 4.3 diatas jumlah kelompok tani menurut kecamatan dan jenis kelamin yang terbanyak pada kecamatan Bukit Kapur.

3.8 DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Secara bahasa, kekerasan (Violence) dimaknai mansour sebagai serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.

Pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun non verbal) yang di tunjukkan untuk menceredai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial maupun ekonomi yang melanggar HAM, bertentangan dengan nilai- nilai dan norma- norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban.

3.8.1 Kekerasan Terhadap Perempuan

Perempuan, sebagaimana laki-laki, memiliki hak asasi yang sama. Sebagai warga negara, perempuan juga berhak hidup tanpa dihantui rasa takut karena kerentanannya menjadi korban kekerasan. Rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan merupakan hak dasar yang sejalan dengan prinsip dasar dari konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan merupakan wujud nyata pemerintah menjamin hak perempuan untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi, termasuk kekerasan.

Tabel 4.4 Jumlah Kasus Perempuan Di Kota Dumai Tahun 2020

NO	BULAN	JUMLAH KESELURUHAN KORBAN	JUMLAH BERDASARKAN KASUS						KDRT	TOTAL KASUS			
			KEKERASAN FISIK		KEKERASAN PSIKIS		KEKERASAN SEKSUAL				EKSPLOITASI	PENELANTARAN	TRAFICKING
			PEREMPUAN DEWASA	PEREMPUAN DEWASA	PEREMPUAN DEWASA	PEREMPUAN DEWASA	PEREMPUAN DEWASA	PEREMPUAN DEWASA			PEREMPUAN DEWASA	PEREMPUAN DEWASA	PEREMPUAN DEWASA
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	FEBRUARI	1	1	1	0	0	0	1	0	1	4		
3	MARET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	MEI	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
6	JUNI	1	1	1	0	0	0	0	0	1	4		
7	JULI	2	2	1	1	0	1	0	1	5	5		
8	AGUSTUS	2	0	2	0	0	0	0	0	2	4		
9	SEPTEMBER	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
10	OKTOBER	4	0	3	1	0	0	0	0	1	5		
11	NOVEMBER	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
12	DESEMBER	3	2	2	0	0	0	0	0	3	7		
JUMLAH		16	6	10	2	0	0	2	0	12	32		

Sumber : UPTD PPA Kota Dumai

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus perempuan tertinggi pada bulan Desember yaitu 7 kasus.

3.8.2 Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Tabel 4.5 Jumlah Kasus Anak Di Kota Dumai Tahun 2020

NO	BULAN	JUMLAH KESELURUHAN KORBAN		JUMLAH BERDASARKAN KASUS												TOTAL KASUS							
				KEKERASAN FISIK		KEKERASAN PSIKIS		KEKERASAN SEKSUAL		EKSPLORASI		PENELANTARAN		TRAFICKING (PERDAGANGAN ORANG)			ABH	HAK ASUH	KDRT				
				ANAK		ANAK		ANAK		ANAK		ANAK		ANAK			ANAK	ANAK	ANAK				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
1	JANUARI	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	0	0	2	3
2	FEBRUARI	4	3	1	2	1	2	0	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	3	0	8	7
3	MARET	3	3	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	3	5
4	APRIL	1	4	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	5
5	MEI	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	JUNI	8	3	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	9	4
7	JULI	1	4	0	2	0	2	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	0	1	2	10
8	AGUSTUS	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0
9	SEPTEMBER	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
10	OKTOBER	3	5	1	0	1	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	6
11	NOVEMBER	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	2
12	DESEMBER	3	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	1	0	2	1	0	0	3	6

JUMLAH	2 9	3 7	5	7	3	7	2	17	0	0	5	6	0	0	10	0	9	12	3	3	3 7	52
TOTAL	66		12		10		19		0		11		0		10		21		6		89	

Sumber : UPTD PPA Kota Dumai

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus anak tertinggi pada bulan Juli yaitu 10 kasus.

BAB IV PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas peremupuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.

Profil Gender merupakan perwujudan dari komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender. Sebagai salah satu upaya pengelolaan data pembangunan maka profil gender disusun secara sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin serta merupakan data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak di Kota Dumai, Profil Gender menyajikan data tentang perbedaan peran maupun keadaan perempuan relatif terhadap laki-laki di berbagai bidang diharapkan dapat menjadi sumber dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan serta penganggaran yang responsif gender untuk kedepannya. Dalam penyusunan Profil Gender Kota Dumai diperlukan dukungan kerjasama dari semua pihak terkait yang dalam hal ini adalah OPD terkait dan instansi vertikal untuk menyerahkan dan mengisi data sesuai dengan tabel data secara benar dan dapat dipercaya. Profil Gender Kota Dumai Tahun 2020 dapat digunakan sebagai acuan bagi perangkat daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam menentukan kebijakan terkait dengan pembangunan gender pada masing-masing bidang pembangunan.